



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**SELASA, 15 OKTOBER 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Kejari Lidik Belanja Fiktif Satpol**

**BENGKULU, BE** - Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, meminta klarifikasi kepada beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Senin (14/10). Mereka diminta klarifikasi terkait dugaan belanja fiktif saat pengamanan pemilu pada April 2019, yang kini dilidik Kejari.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan

Ridwan SH MH kepada BE kemarin (14/10) menuturkan, "Dimintai keterangan saja, saya tidak bisa terlalu jauh memberikan keterangan," jelas Kajari.

Dugaan belanja fiktif tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Bengkulu. Tidak heran jika penyidik meminta klarifikasi terhadap beberapa pihak yang diduga mengetahui

terkait dugaan belanja fiktif tersebut. Setidaknya ada lima orang dimintai klarifikasi pada Senin (14/10). Mereka antara lain, Kabid Ketertiban Umum Martina, Kasi Operasi Asmilaidi, Kasi Ketentraman Masyarakat Ujang Jauhari, Bendaraha Fatimah dan satu orang staf Wono.

Beberapa saksi yang dimintai keterangan tidak mengaku tidak tahu mereka diperiksa terkait kasus apa, salah satu-

nya Ujang Jauhari.

"Saya tidak tahu persis itu, lupa ditanya berapa pertanyaan," singkatnya sembari berlalu.

Asmilaidi Kasi Ops Satpol PP Kota Bengkulu mengaku dirinya mendapat 13 pertanyaan dari penyidik Pidsus Kejari Bengkulu terkait dugaan belanja fiktif tersebut.

"Saya diperiksa ya saya sampaikan apa yang saya tahu," jelasnya.

Dugaan pelanggaran yang terjadi di Satpol PP tersebut diantaranya honor ratusan petugas Satpol PP Kota Bengkulu yang melakukan pengamanan pemilu setiap Kecamatan dan Kelurahan tidak dibayarkan. Ada juga belanja makan minum yang diduga fiktif. Diduga anggaran belanja tersebut sebesar Rp 9,5 miliar, dibagi belanja tidak langsung Rp 4,3 miliar dan belanja langsung Rp 5,1 miliar. (167)